E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Implementasi Program Kampung Bahari Nusantara Tlocor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Sidoarjo

Tri Santi P. Happy[1], Sri Umiyati[2], Tresna Kusumawati[3]
[12]Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya, sri.umiyati@hangtuah.ac.id
[3]Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya, tresna@hangtuah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) dalam program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) melalui pendekatan yang mengintegrasikan lima klaster, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan. Berangkat dari adanya kesenjangan antara keberhasilan pembangunan fisik lima klaster Program KBN dengan keberlanjutan implementasi program pada fase pascapembangunan di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan unsur TNI AL, Pemerintah Desa, BUMDes, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Bahari Nusantara telah berjalan pada lima klaster utama, namun keberlanjutannya belum optimal. Dimensi komunikasi menunjukkan koordinasi antaraktor telah terbangun, tetapi belum berlangsung secara rutin. Pada dimensi sumber daya masih ditemukan keterbatasan anggaran operasional, sumber daya manusia, dan keberlanjutan pembinaan. Dimensi disposisi menunjukkan adanya komitmen pelaksana yang tinggi, meskipun partisipasi dan kemandirian masyarakat belum merata. Dimensi struktur birokrasi memperlihatkan pembagian peran antaraktor telah terbentuk, tetapi mekanisme koordinasi dan evaluasi belum terintegrasi. Faktor pendukung meliputi komitmen para pemangku kepentingan, potensi wisata bahari, dukungan masyarakat dan sinergi kelembagaan.

Kata kunci: *Program, Bahari , Pemberdayaan, Masyarakat, Pesisir*

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Kampung Bahari Nusantara (KBN) Program as part of a coastal community empowerment initiative launched by the Indonesian National Armed Forces Navy (TNI AL) through an approach that integrates five clusters: education, health, economy, tourism, and defense. The study was prompted by the gap between the success of physical development in the five clusters of the KBN Program and the sustainability of program implementation during the post-construction phase in Tlocor Hamlet, Kedungpandan Village, Jabon Subdistrict, Sidoarjo Regency. The study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving representatives from the TNI AL, the village government, the Village-Owned Enterprise (BUMDes), community groups, MSME operators, and community leaders. Data analysis was conducted using the Miles, Huberman, and Saldaña interactive model, which includes data condensation, data presentation, and the drawing and verification of conclusions. The results indicate that the implementation of the Kampung Bahari Nusantara Program has been carried out across five main clusters; however, its sustainability remains suboptimal. The communication dimension reveals that coordination among stakeholders has been established but does not yet occur on a regular basis. In the resource dimension,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

limitations were still found in operational budgets, human resources, and the sustainability of capacity-building efforts. The disposition dimension revealed a high level of commitment among implementers, although community participation and self-reliance were not yet evenly distributed. The dimensions of the bureaucratic structure indicate that a division of roles among actors has been established, but coordination and evaluation mechanisms have not yet been integrated. Supporting factors include stakeholder commitment, marine tourism potential, community support, and institutional synergy.

Keywords: *Program, Marine, Empowerment, Community, Coastal*

Corresponding Author:
Tri Santi P. Happy
Universitas Hang Tuah Surabaya, sri.umiyati@hangtuah.ac.id

PENDAHULUAN

Wilayah Pesisir merupakan Kawasan Strategis yang memiliki peran penting dalam mendukung Pembangunan Nasional karena memiliki potensi sumber daya alam, jasa, lingkungan dan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Basri, 2020). Komitmen Pemerintah dalam membangun masyarakat pesisir diwujudkan melalui berbagai kebijkan pembangunan kelautan yang berorientasi pada peningkatan kesejateraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) yaitu program pemberdayaan masyarakat pesisir yang diinisiasi oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sesuai amanat Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa tugas Pokok TNI salah satunya adalah Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Kusendarto & Maswir, 2025). Kehadiran Program Kampung Bahari Nusantara merupakan bentuk sinergi antara fungsi pertahanan negara dengan fungsi pemberdayaan masyarakat dalam rangka memperkuat ketahanan wilayah maritim sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir (Daryono et al., 2021).

Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan publik yang memadukan fungsi pertahanan negara dengan fungsi pembangunan sosial-ekonomi masyarakat pesisir melalui pendekatan whole of government (Aulia et al., 2026). Program ini dikembangkan sebagai strategi percepatan pembangunan desa pesisir dengan mengintegrasikan lima klaster utama, yaitu klaster pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan (Aliyani, 2021). Kelima klaster tersebut tidak dirancang sebagai program yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem pemberdayaan yang saling berkaitan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, mengembangkan potensi ekonomi berbasis maritim, serta membangun ketahanan wilayah pesisir secara berkelanjutan (Akbar et al., 2022). Dengan demikian, Kampung Bahari Nusantara tidak hanya dipahami sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen implementasi kebijakan publik yang diarahkan untuk menghasilkan perubahan sosial melalui proses pemberdayaan masyarakat pesisir (Kasmar & Irawansah, 2025).

Dalam Implementasinya, TNI AL mengembangkan Program Kawasan Kampung Bahari Nusantara (KBN) sebagai strategi akselerasi pembangunan desa pesisir yang tidak hanya berorientasi pada aspek pertahanan maritim, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi local (Khoir, 2024). Program Kampung Bahari di Dusun Tlocor, Desa Kedungpandan, Kecamatan Jabon Kabupaten

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Sidoarjo, diinisiasi oleh TNI AL (Pasmar II) yang diresmikan pada Desember 2023 merupakan salah satu ruang pesisir yang sedang mengalami transformasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kawasan ini diarahkan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis Pariwisata, Edukasi, Ekonomi, Kesehatan dan Pertahanan yang dikembangkan dalam Klaster-klaster (Aminuddin & Burhanuddin, 2023). Kelima Klaster tersebut dirancang sebagai satu kesatuan program yang saling mendukung dalam mewujudkan masyarakat pesisir yang mandiri, produktif, sehat, berpendidikan serta memiliki kesadaran terhadap pentingnya menjaga wilayah maritim sesuai Keputusan Kasal Nomor Kep/2384/VIII/2021 tanggal 5 Agustus 2021 tentang Petunjuk Referensi Program Kampung Bahari Nusantara (Perdani et al., 2025).

Kelima klaster tersebut dirancang secara terpadu untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat pesisir sekaligus mengembangkan potensi wilayah maritime (Perdani et al., 2025). Klaster edukasi diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat melalui Rumah Pintar dan kegiatan pembinaan (Konradus, 2024). Klaster kesehatan diarahkan pada pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kesadaran hidup sehat. Klaster ekonomi mendorong pengembangan UMKM dan kegiatan usaha berbasis potensi lokal, sedangkan klaster pariwisata diarahkan pada pengembangan potensi wisata bahari Tlocor sebagai pintu menuju Pulau Lusi (Ningtyas & Rosdiana, 2025). Adapun klaster pertahanan dilaksanakan melalui pembinaan wawasan kebangsaan, bela negara, dan kesadaran masyarakat pesisir sebagai bagian dari pembinaan potensi maritime (Prabowo et al., 2025).

Kelima klaster tersebut merupakan indikator implementasi program yang dirancang untuk menghasilkan keluaran (output) berupa peningkatan kualitas pelayanan dasar dan pengembangan potensi lokal masyarakat pesisir (Nofiyanti et al., 2025). Klaster pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui Rumah Pintar dan kegiatan pembinaan masyarakat. Klaster kesehatan bertujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat pesisir. Klaster ekonomi berorientasi pada pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, sedangkan klaster pariwisata diarahkan sebagai penggerak ekonomi kawasan melalui pengembangan Wisata Bahari Tlocor dan akses menuju Pulau Lusi (Hafit & Sukmana, 2023). Adapun klaster pertahanan berfungsi memperkuat kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, dan ketahanan wilayah maritim. Integrasi kelima klaster tersebut menjadi karakteristik utama Program Kampung Bahari Nusantara yang membedakannya dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat pesisir lainnya (Wulandari et al., 2025).

Dalam perkembangannya, klaster ekonomi dan pariwisata menjadi bagian yang paling terlihat dalam aktivitas masyarakat di kawasan Tlocor. Keberadaan wisata bahari membuka peluang bagi masyarakat untuk menjalankan usaha kuliner, UMKM, jasa perahu, dan kegiatan jasa lainnya. Pengembangan dermaga serta fasilitas pendukung kawasan wisata juga memperkuat posisi Tlocor sebagai pintu akses menuju Pulau Lusi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Program KBN telah membuka ruang bagi pengembangan potensi ekonomi lokal melalui aktivitas pariwisata bahari (Rian et al., 2023).

Namun, perkembangan antar-klaster belum menunjukkan tingkat keberlanjutan yang sama. Pada klaster edukasi, keberadaan Rumah Pintar telah menyediakan ruang bagi kegiatan belajar dan pembinaan, tetapi partisipasi peserta mengalami penurunan. Pada klaster kesehatan, fasilitas pos kesehatan telah tersedia, tetapi pelayanan belum dapat dilaksanakan secara rutin karena keterbatasan petugas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan fasilitas pada lima klaster belum secara otomatis menjamin keberlanjutan kegiatan pemberdayaan masyarakat (Padilah et al., 2025).

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Pengamatan awal juga menunjukkan bahwa pengelolaan Program KBN Tlocor pascapembangunan melibatkan aktor dengan tugas dan kewenangan yang berbeda. TNI Angkatan Laut melalui Pasmar II berperan dalam pembangunan dan pembinaan program, pemerintah desa dan BUMDes menjalankan kegiatan pengelolaan lokal dan wisata, sedangkan masyarakat terlibat dalam kegiatan UMKM, jasa perahu, dan aktivitas ekonomi lainnya. Namun, masing-masing aktor cenderung menjalankan kegiatan berdasarkan program dan kewenangan kelembagaannya sehingga koordinasi pengelolaan program pascapembangunan belum sepenuhnya terintegrasi .

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tantangan utama Program Kampung Bahari Nusantara tidak lagi terletak pada proses pembangunan fasilitas, melainkan pada keberlanjutan implementasi program setelah seluruh klaster selesai dibangun. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari tersedianya sarana fisik, tetapi juga dari kemampuan para aktor mempertahankan fungsi program melalui komunikasi yang berkelanjutan, koordinasi lintas kelembagaan, dukungan sumber daya, serta komitmen pelaksana dalam menggerakkan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, persoalan utama penelitian ini berada pada fase implementasi pascapembangunan (post-implementation phase), yaitu bagaimana program tetap berjalan dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. (Edward III, 1980; Hill & Hupe, 2014).

Selain itu, berdasarkan informasi awal yang diperoleh peneliti, belum terdapat alokasi anggaran khusus untuk pengelolaan Program KBN Tlocor pada tingkat Pasmar II. Pelaksanaan teknis dan pemeliharaan fasilitas di lapangan masih memanfaatkan dukungan sumber daya satuan yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan sumber daya dalam menjaga kesinambungan pembinaan, pemanfaatan fasilitas, dan keberlanjutan kegiatan program. Fenomena lain terlihat pada keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan. Sebagian masyarakat telah memanfaatkan keberadaan Kawasan Tlocor melalui kegiatan UMKM, jasa perahu, dan usaha kuliner. Namun, partisipasi tersebut belum merata. Pada kegiatan tertentu, keterlibatan masyarakat masih dipengaruhi oleh adanya bantuan material. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana Program KBN Tlocor telah mampu mendorong masyarakat dari posisi penerima manfaat menuju masyarakat yang memiliki kapasitas dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan program.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan (implementation gap) antara tujuan kebijakan dengan kondisi empiris di lapangan. Secara normatif, Program Kampung Bahari Nusantara diharapkan mampu mentransformasikan masyarakat pesisir menjadi masyarakat yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing melalui pemberdayaan lima klaster. Namun dalam praktiknya, tidak seluruh klaster berkembang dengan tingkat keberhasilan yang sama. Sebagian program masih menghadapi keterbatasan keberlanjutan kegiatan, koordinasi antaraktor, dan partisipasi masyarakat. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar akademik pentingnya penelitian implementasi Program Kampung Bahari Nusantara di Desa Kedungpandan. (Grindle, 1980; Edward III, 1980).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pembangunan fasilitas dan pelaksanaan awal Program KBN dengan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat pesisir pascapembangunan. Program telah menghasilkan sarana dan kegiatan pada lima klaster KBN, tetapi keberlanjutan pengelolaan, konsistensi komunikasi antaraktor, dukungan sumber daya operasional, dan kemandirian masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam. Secara normatif, pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, yang menegaskan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Prinsip keberlanjutan, keterpaduan, dan partisipasi masyarakat menjadi landasan utama pengelolaan pesisir.

Selain itu, pengembangan wisata bahari sebagai instrumen peningkatan ekonomi lokal juga memperoleh legitimasi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pada pasal 18, menekankan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mengatur serta mengelola urusan kepariwisataan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat lokal (pasal 5). Dalam konteks inilah program Kampung Bahari Nusantara diposisikan sebagai bentuk integrasi antara agenda peningkatan kapasitas sosial-ekonomi masyarakat, penguatan kelembagaan lokal, serta pengembangan usaha berbasis potensi maritim.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi program dan pemberdayaan masyarakat pesisir dari berbagai perspektif. Penelitian mengenai implementasi pemberdayaan masyarakat pesisir menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan dan infrastruktur, tetapi juga dipengaruhi oleh keberlanjutan pelatihan, kemampuan masyarakat, akses permodalan, dan dukungan kelembagaan. Penelitian di Kampung Urumb Kabupaten Merauke, misalnya, menemukan bahwa program pemberdayaan telah dilaksanakan, tetapi masih menghadapi persoalan keberlanjutan pengembangan kemampuan masyarakat, keterbatasan permodalan, dan sarana pendukung.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu dapat dipahami bahwa kajian mengenai pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya berfokus pada aspek pertumbuhan ekonomi, pengembangan kawasan pesisir, collaborative governance, maupun kontribusi Program Kampung Bahari Nusantara terhadap ketahanan maritim. Penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan manfaat program bagi masyarakat maupun wilayah pesisir, namun belum secara khusus mengkaji bagaimana proses implementasi Program Kampung Bahari Nusantara berlangsung setelah pembangunan lima klaster selesai dilaksanakan. Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih banyak menilai keberhasilan program dari sisi keluaran (output), sedangkan dinamika implementasi pascapembangunan, keberlanjutan pengelolaan program, koordinasi antaraktor, dan proses pemberdayaan masyarakat masih relatif terbatas untuk dibahas.

Atas dasar uraian diatas, research gap penelitian ini terletak pada analisis implementasi Program Kampung Bahari Nusantara pada fase pascapembangunan melalui perspektif implementasi kebijakan George C. Edward III. Penelitian ini memfokuskan perhatian pada bagaimana komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi memengaruhi keberlanjutan implementasi lima klaster Program Kampung Bahari Nusantara dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan demikian, kebaruan (novelty) penelitian ini tidak hanya terletak pada objek penelitian, tetapi juga pada penempatan fase implementasi pascapembangunan sebagai fokus utama analisis, sehingga mampu menjelaskan mengapa pembangunan fisik yang telah selesai belum sepenuhnya menghasilkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. (Rudiawan et al., 2021; Reza Arentama et al., 2024).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif rnerupakan proses/prosedur penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan, rnendeskripsikan dan menganalisis data berupa tulisan, ungkapan, perilaku manusia yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

pendekatan studi kasus (Cresswell, 2018) karena fenomena Implementasi Program KBN Tlocor dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Kedung Pandan Kec. Jabon Kabupaten Sidoarjo"

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Kampung Bahari Nusantara Tlocor Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Kedung Pandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi dalam pelaksanaan aturan tersebut maka dipergunakan model implementasi kebijakan menurut George Edward III berikut ini; 1).Komunikasi terdiri dari faktor-faktor antara lain: Transmisi, Kejelasan dan Konsistensi. 2).Sumber Daya terdiri dari faktor: SDM / Staf, Informasi, Wewenang dan Fasilitas /Anggaran. 3). Disposisi meliputi faktor: Karakteristik Pelaksana, Respon terhadap Kebijakan dan Insentif. 4).Sturuktur Birokrasi terdiri dari Standar Operasional Prosedur dan Fragmentasi / Pembagian tugas kewenangan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif oleh Miles dan Huberman (2014), yaitu untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut : 1). Pengumpulan Data (Data Collection); 2) Kondensasi Data (Data Condensation); 3). Penyajian Data (Data Display); 4) Penarikan Kesimpulan (Conclusion, Drawing/verifying)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Program Kampung Bahari Nusantara Tlocor

Implementasi Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tlocor merupakan bentuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang mengintegrasikan pembangunan sarana fisik dengan kegiatan pada klaster edukasi, ekonomi, kesehatan, pariwisata, dan pertahanan. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program KBN Tlocor telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya melalui penyediaan fasilitas serta terbukanya peluang kegiatan ekonomi dan sosial. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program belum sepenuhnya optimal dan berkelanjutan. Analisis menggunakan model implementasi George C. Edward III menunjukkan bahwa kondisi tersebut dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan dalam memengaruhi keberlanjutan Program KBN Tlocor

1.Komunikasi dan Keberlanjutan Implementasi Program

Komunikasi yang efektif tidak hanya menekankan pada penyampaian informasi (transmission), tetapi juga pada kejelasan pesan (clarity) dan konsistensi kebijakan (consistency). Ketiga dimensi tersebut menjadi prasyarat agar setiap aktor memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan kebijakan sehingga mampu melaksanakan program secara terkoordinasi (Edward III, 1980).

Dalam konteks Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tlocor, komunikasi memiliki peran yang sangat strategis karena program ini melibatkan aktor dengan karakteristik yang berbeda, yaitu TNI Angkatan Laut melalui Pasmar II sebagai inisiator program, Pemerintah Desa Kedungpandan, BUMDes sebagai pengelola kawasan, serta masyarakat pesisir sebagai kelompok sasaran pemberdayaan. Perbedaan karakter organisasi, kewenangan, dan kepentingan tersebut menuntut adanya mekanisme komunikasi yang mampu membangun kesamaan persepsi mengenai tujuan program, pembagian tugas, serta strategi keberlanjutan pengelolaan lima klaster Program Kampung Bahari Nusantara.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi pada tahap awal implementasi Program Kampung Bahari Nusantara berjalan relatif efektif. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh Pasmar II bersama Pemerintah Desa Kedungpandan berhasil memperkenalkan tujuan Program KBN kepada masyarakat serta membangun dukungan terhadap pelaksanaan lima klaster, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan. Forum sosialisasi, koordinasi lintas instansi, dan komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi media utama dalam menyampaikan tujuan pembangunan kawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa proses transmission kebijakan telah berjalan sesuai dengan prinsip implementasi yang dikemukakan Edward III, di mana informasi mengenai tujuan program dapat diterima oleh para pelaksana maupun masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing klaster Program Kampung Bahari Nusantara. Pada klaster ekonomi dan pariwisata, komunikasi relatif lebih intensif karena aktivitas kawasan wisata dan pengelolaan UMKM menuntut koordinasi yang lebih sering antara BUMDes, masyarakat, dan pemerintah desa. Sebaliknya, pada klaster pendidikan dan kesehatan, komunikasi cenderung berkurang setelah fasilitas fisik selesai dibangun sehingga beberapa kegiatan pembinaan tidak lagi berlangsung secara rutin. Sementara itu, pada klaster pertahanan, komunikasi masih dilakukan melalui kegiatan pembinaan yang bersifat insidental sesuai dengan program pembinaan potensi maritim yang dimiliki TNI Angkatan Laut. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan komunikasi sangat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing klaster, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang mampu menjaga kesinambungan seluruh program secara terpadu.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya memenuhi prinsip consistency sebagaimana dijelaskan oleh Edward III. Konsistensi komunikasi bukan hanya berarti penyampaian informasi yang sama kepada seluruh pelaksana, tetapi juga keberlangsungan komunikasi sepanjang siklus implementasi kebijakan. Ketika komunikasi mulai berkurang setelah pembangunan selesai, maka koordinasi antarlembaga, pembinaan masyarakat, serta proses evaluasi program juga ikut mengalami penurunan. Oleh karena itu, efektivitas implementasi Program Kampung Bahari Nusantara tidak cukup diukur dari keberhasilan sosialisasi pada tahap awal, tetapi juga dari kemampuan mempertahankan komunikasi yang berkelanjutan selama program berlangsung.

Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat, komunikasi juga berfungsi sebagai media pembelajaran sosial (social learning). Proses komunikasi yang berlangsung secara dialogis memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai program, tetapi juga menyampaikan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi mereka dalam pengelolaan kawasan. Dengan demikian, komunikasi menjadi instrumen penting dalam membangun partisipasi masyarakat yang aktif, sekaligus memperkuat rasa memiliki (sense of ownership) terhadap Program Kampung Bahari Nusantara. Semakin baik komunikasi yang dibangun antara pemerintah, TNI Angkatan Laut, BUMDes, dan masyarakat, maka semakin besar peluang terciptanya keberlanjutan program pemberdayaan masyarakat pesisir.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi dalam implementasi Program Kampung Bahari Nusantara Tlocor telah berjalan efektif pada tahap awal implementasi, khususnya dalam penyampaian tujuan program dan pembangunan lima klaster. Akan tetapi, komunikasi pada fase pascapembangunan belum berlangsung secara konsisten sehingga memengaruhi keberlanjutan pembinaan dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Oleh karena itu,

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penelitian ini menegaskan bahwa komunikasi tidak hanya merupakan faktor yang menentukan keberhasilan implementasi awal, tetapi juga menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan Program Kampung Bahari Nusantara dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Temuan ini sekaligus menunjukkan bahwa penguatan komunikasi kelembagaan yang bersifat periodik merupakan strategi yang perlu dikembangkan agar lima klaster Program Kampung Bahari Nusantara dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir sesuai dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Sumber Daya dan Keberlanjutan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Dalam implementasi Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tlocor, ketersediaan sumber daya menjadi faktor yang sangat menentukan karena program ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik kawasan, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari tersedianya sarana dan prasarana, melainkan juga dari kemampuan seluruh pemangku kepentingan dalam mengelola, memanfaatkan, dan mengembangkan sumber daya tersebut agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, analisis sumber daya dalam penelitian ini tidak hanya difokuskan pada aspek fisik, tetapi juga mencakup aspek kelembagaan, pendanaan, kapasitas sumber daya manusia, dan dukungan organisasi dalam menjaga keberlanjutan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Bahari Nusantara telah berhasil menyediakan berbagai fasilitas fisik sebagai bagian dari implementasi lima klaster pembangunan. Sarana yang dibangun meliputi Rumah Pintar sebagai pendukung klaster pendidikan, Pos Kesehatan sebagai bagian dari klaster kesehatan, kawasan wisata bahari dan fasilitas pendukungnya dalam klaster pariwisata, sarana ekonomi masyarakat melalui penguatan UMKM dan aktivitas wisata, serta fasilitas pendukung pembinaan potensi maritim pada klaster pertahanan. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa pemerintah bersama TNI Angkatan Laut telah berhasil menyediakan physical resources sebagai modal awal pemberdayaan masyarakat pesisir.

Dari perspektif implementasi kebijakan, penyediaan fasilitas tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Infrastruktur yang tersedia membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta memperkuat kapasitas sosial masyarakat pesisir. Dengan demikian, sumber daya fisik yang dimiliki Program Kampung Bahari Nusantara dapat dikatakan telah memenuhi tujuan awal implementasi kebijakan, yaitu menyediakan sarana pendukung bagi proses pemberdayaan masyarakat.

Selain aspek pendanaan, penelitian juga mengidentifikasi pentingnya sumber daya manusia dalam mendukung implementasi program. Program Kampung Bahari Nusantara melibatkan berbagai aktor, antara lain Pasmar II, Pemerintah Desa Kedungpandan, BUMDes, kelompok masyarakat, pelaku UMKM, serta organisasi kemasyarakatan yang berperan dalam pengelolaan kawasan. Keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing aktor dalam menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa dan pengelola kawasan cukup baik dalam menjalankan aktivitas operasional, namun masih diperlukan peningkatan kompetensi dalam aspek manajemen destinasi wisata, pengembangan usaha masyarakat, pemasaran digital, serta pengelolaan kelembagaan berbasis masyarakat.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Penelitian ini juga menemukan bahwa kewenangan kelembagaan (authority) telah terdistribusi dengan cukup jelas antara TNI Angkatan Laut sebagai inisiator program, Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan lokal, serta BUMDes sebagai pengelola aktivitas ekonomi kawasan. Pembagian kewenangan tersebut memberikan kepastian mengenai peran masing-masing aktor dalam implementasi program. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan kewenangan masih memerlukan koordinasi yang lebih intensif agar setiap aktor mampu menjalankan tanggung jawabnya secara sinergis, khususnya pada fase pascapembangunan ketika intensitas pendampingan dari TNI Angkatan Laut mulai berkurang.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan informasi sebagai bagian dari sumber daya implementasi. Informasi mengenai mekanisme pengelolaan kawasan, prosedur pemanfaatan fasilitas, peluang pengembangan usaha, serta arah kebijakan pengembangan kawasan perlu disampaikan secara berkelanjutan kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi pada tahap pembangunan relatif mudah diperoleh melalui kegiatan sosialisasi, namun setelah program berjalan, mekanisme penyampaian informasi belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Program Kampung Bahari Nusantara.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya dalam implementasi Program Kampung Bahari Nusantara Tlocor telah menunjukkan kondisi yang relatif baik pada aspek penyediaan sarana dan prasarana, pembagian kewenangan, serta dukungan kelembagaan awal. Akan tetapi, keberlanjutan implementasi masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya operasional, kapasitas sumber daya manusia, dan mekanisme pendanaan pascapembangunan. Oleh karena itu, penguatan sumber daya tidak lagi hanya diarahkan pada pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat agar seluruh klaster Program Kampung Bahari Nusantara dapat berkembang secara berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan menjaga keberlangsungan sumber daya yang mendukung proses pemberdayaan masyarakat pesisir.

3. Disposisi Pelaksana dan Kemandirian Masyarakat

Dalam implementasi Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tlocor, disposisi para pelaksana memiliki arti penting karena keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh pembangunan lima klaster, tetapi juga oleh kemauan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keberlanjutan program setelah pembangunan fisik selesai dilaksanakan. Program ini melibatkan TNI Angkatan Laut melalui Pasmar II, Pemerintah Desa Kedungpandan, BUMDes, kelompok masyarakat, pelaku usaha lokal, dan organisasi kemasyarakatan. Dengan karakteristik aktor yang beragam, implementasi program memerlukan komitmen bersama agar tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi para pelaksana pada tahap awal implementasi Program Kampung Bahari Nusantara menunjukkan kondisi yang positif. TNI Angkatan Laut sebagai penggagas program memperlihatkan komitmen yang kuat dalam membangun kawasan Kampung Bahari Nusantara melalui penyediaan fasilitas lima klaster serta kegiatan pembinaan masyarakat. Pemerintah Desa Kedungpandan juga menunjukkan dukungan terhadap program dengan memfasilitasi koordinasi, mendukung pengelolaan kawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan. Sikap positif tersebut menjadi modal awal yang

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

penting dalam menciptakan sinergi antaraktor selama proses implementasi berlangsung.

Komitmen yang ditunjukkan oleh para pelaksana juga tercermin dari kesediaan mereka untuk berkolaborasi dalam mengembangkan potensi kawasan wisata Tlocor. Berbagai kegiatan yang melibatkan pemerintah desa, BUMDes, kelompok sadar wisata, pelaku UMKM, serta masyarakat menunjukkan adanya kesamaan tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan potensi lokal. Dari perspektif implementasi kebijakan, kondisi ini menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki tingkat penerimaan (acceptance) yang baik terhadap Program Kampung Bahari Nusantara sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal kebijakan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tantangan implementasi mulai muncul ketika program memasuki fase pascapembangunan. Setelah pembangunan fisik lima klaster selesai, tingkat keterlibatan beberapa aktor mengalami perubahan. Intensitas pembinaan yang mulai berkurang serta belum terbentuknya mekanisme koordinasi yang bersifat permanen menyebabkan komitmen implementasi lebih banyak bergantung pada inisiatif masing-masing aktor. Kondisi ini menunjukkan bahwa disposisi yang kuat pada tahap pembangunan belum sepenuhnya terlembagakan menjadi komitmen organisasi yang mampu menjaga keberlanjutan implementasi Program Kampung Bahari Nusantara.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa disposisi masyarakat sebagai kelompok sasaran mengalami perkembangan yang positif, meskipun belum merata. Sebagian masyarakat telah menunjukkan kesediaan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pengembangan usaha berbasis wisata, penyediaan jasa transportasi menuju Pulau Lusi, pengelolaan kuliner, serta berbagai usaha mikro lainnya. Partisipasi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran terhadap manfaat Program Kampung Bahari Nusantara sebagai sarana peningkatan kesejahteraan. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa tidak seluruh masyarakat memiliki tingkat partisipasi yang sama. Sebagian masyarakat masih bersifat pasif dan menunggu dukungan dari pemerintah maupun TNI Angkatan Laut sehingga proses transformasi menuju masyarakat yang mandiri belum berlangsung secara optimal.

Jika dianalisis berdasarkan lima klaster Program Kampung Bahari Nusantara, disposisi para pelaksana memberikan pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing klaster. Pada klaster ekonomi dan pariwisata, komitmen masyarakat relatif lebih tinggi karena manfaat ekonomi dapat dirasakan secara langsung melalui peningkatan aktivitas wisata dan berkembangnya usaha masyarakat. Sebaliknya, pada klaster pendidikan dan kesehatan, keberhasilan implementasi lebih bergantung pada konsistensi pembinaan dari pemerintah dan lembaga terkait karena manfaatnya bersifat jangka panjang. Sementara itu, pada klaster pertahanan, disposisi masyarakat tercermin melalui meningkatnya kesadaran bela negara, kepedulian terhadap lingkungan pesisir, serta partisipasi dalam kegiatan pembinaan potensi maritim yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap klaster memerlukan pendekatan implementasi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakat.

Dari sudut pandang administrasi publik, disposisi juga mencerminkan kualitas kepemimpinan dan tata kelola kolaboratif dalam implementasi kebijakan. Komitmen yang dimiliki oleh para pelaksana perlu diterjemahkan ke dalam mekanisme kerja yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta budaya organisasi yang mendukung kolaborasi antarpemangku kepentingan. Dengan demikian, keberlanjutan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Program Kampung Bahari Nusantara tidak hanya ditentukan oleh individu-individu yang memiliki dedikasi tinggi, tetapi juga oleh kemampuan organisasi membangun sistem yang mampu mempertahankan komitmen tersebut dalam jangka panjang.

4. Struktur Birokrasi dan Fragmentasi Antaraktor

Dalam implementasi Program Kampung Bahari Nusantara (KBN) Tlocor, struktur birokrasi memiliki karakteristik yang kompleks karena melibatkan berbagai institusi dengan fungsi dan kewenangan yang berbeda. TNI Angkatan Laut melalui Pasmar II berperan sebagai penggagas sekaligus pelaksana awal program, sedangkan Pemerintah Desa Kedungpandan berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan masyarakat. Selain itu, BUMDes memiliki fungsi dalam pengelolaan aktivitas ekonomi dan kawasan wisata, sementara masyarakat berperan sebagai penerima manfaat sekaligus pelaku utama pemberdayaan. Struktur kelembagaan yang bersifat multipihak tersebut menuntut adanya tata kelola yang mampu mengintegrasikan seluruh aktor agar implementasi program berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembagian kewenangan antaraktor dalam Program Kampung Bahari Nusantara telah ditetapkan secara relatif jelas sejak tahap awal implementasi. Pasmar II bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan pembangunan lima klaster sesuai dengan kebijakan TNI Angkatan Laut, sedangkan Pemerintah Desa berfungsi sebagai mitra dalam pelaksanaan program di tingkat lokal. Setelah pembangunan selesai, pengelolaan kawasan lebih banyak dilaksanakan oleh Pemerintah Desa bersama BUMDes dengan melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam berbagai kegiatan ekonomi dan pariwisata. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah memberikan dasar kelembagaan bagi pelaksanaan Program Kampung Bahari Nusantara.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa struktur birokrasi pada fase pasca pembangunan masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya mekanisme koordinasi kelembagaan yang bersifat permanen untuk mengatur hubungan antaraktor setelah pembangunan fisik selesai. Koordinasi lebih banyak dilakukan berdasarkan kebutuhan operasional atau komunikasi informal dibandingkan melalui forum kelembagaan yang terjadwal secara berkala. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan pembinaan masyarakat, evaluasi program, dan pengembangan lima klaster belum sepenuhnya berjalan secara terintegrasi. Dengan demikian, meskipun struktur organisasi telah terbentuk, mekanisme birokrasi yang menopang keberlanjutan implementasi masih memerlukan penguatan.

Selain aspek koordinasi, penelitian juga menunjukkan bahwa keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan implementasi. Pada tahap pembangunan, berbagai kegiatan telah mengikuti pedoman pelaksanaan yang ditetapkan oleh TNI Angkatan Laut. Namun, setelah kawasan diserahkan untuk dikelola bersama Pemerintah Desa dan BUMDes, belum seluruh aktivitas operasional memiliki SOP yang mengatur pembagian tugas, mekanisme pemeliharaan fasilitas, tata cara pengelolaan kawasan wisata, maupun prosedur evaluasi pelaksanaan lima klaster. Akibatnya, beberapa kegiatan lebih banyak bergantung pada kebiasaan kerja atau kesepakatan informal antaraktor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan implementasi memerlukan penguatan tata kelola birokrasi yang tidak hanya mengatur siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana setiap aktor melaksanakan tugasnya secara konsisten. SOP berfungsi sebagai instrumen yang mampu menjamin kesinambungan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

implementasi meskipun terjadi pergantian personel atau perubahan kepemimpinan. Dengan adanya prosedur yang jelas, implementasi Program Kampung Bahari Nusantara akan lebih adaptif terhadap dinamika organisasi sekaligus tetap menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa struktur birokrasi memiliki pengaruh yang berbeda terhadap implementasi lima klaster Program Kampung Bahari Nusantara. Pada klaster ekonomi dan pariwisata, koordinasi antara Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat relatif berjalan lebih baik karena aktivitas ekonomi memerlukan pengelolaan harian yang intensif. Sebaliknya, pada klaster pendidikan dan kesehatan, koordinasi masih sangat bergantung pada dukungan lembaga eksternal sehingga keberlanjutan program memerlukan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur. Pada klaster pertahanan, pembinaan masih banyak dilakukan oleh TNI Angkatan Laut melalui kegiatan yang bersifat periodik. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa setiap klaster membutuhkan pengaturan birokrasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatannya.

Dari perspektif administrasi publik, struktur birokrasi dalam Program Kampung Bahari Nusantara dapat dipahami sebagai bentuk tata kelola kolaboratif (collaborative governance) yang melibatkan institusi pemerintah, organisasi militer, badan usaha milik desa, dan masyarakat. Model tata kelola seperti ini memiliki kelebihan karena mampu menggabungkan sumber daya dan kapasitas dari berbagai aktor. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya mekanisme koordinasi, komunikasi, dan akuntabilitas yang berjalan secara konsisten.

Apabila dikaitkan dengan tujuan penelitian, struktur birokrasi yang telah terbentuk memberikan dasar yang cukup baik bagi implementasi Program Kampung Bahari Nusantara. Akan tetapi, keberhasilan pembangunan fisik lima klaster belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan tata kelola birokrasi pada fase pascapembangunan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih formal melalui forum koordinasi lintas sektor, penyusunan SOP pengelolaan lima klaster, pembagian tugas yang lebih rinci, serta sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Langkah-langkah tersebut akan memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan implementasi program.

5. Implementasi Program KBN Tlocor dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kampung Bahari Nusantara di Desa Kedungpandan telah menghasilkan perubahan yang nyata dalam pengembangan kawasan pesisir, khususnya melalui pembangunan lima klaster yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan. Pembangunan berbagai fasilitas pendukung telah membuka akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis wisata, memperkuat kelembagaan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kawasan pesisir sebagai bagian dari ketahanan maritim nasional. Dengan demikian, Program Kampung Bahari Nusantara telah berhasil menciptakan fondasi awal bagi proses pemberdayaan masyarakat pesisir.

Apabila dianalisis berdasarkan variabel komunikasi, penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pada tahap awal dipengaruhi oleh proses sosialisasi yang efektif serta koordinasi antara Pasmar II, Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat. Komunikasi tersebut berhasil membangun kesamaan persepsi mengenai tujuan program sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan. Akan tetapi, pada fase pascapembangunan, intensitas komunikasi mengalami penurunan sehingga proses pembinaan masyarakat belum berlangsung

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

secara berkesinambungan. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi telah berhasil mendukung implementasi awal, namun masih memerlukan penguatan agar mampu menopang keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek sumber daya, penelitian menunjukkan bahwa Program Kampung Bahari Nusantara telah memiliki dukungan infrastruktur yang memadai melalui pembangunan lima klaster. Sarana fisik yang tersedia menjadi modal penting dalam mendukung aktivitas masyarakat. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa sumber daya operasional berupa pendanaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat perkembangan antar-klaster belum berlangsung secara seimbang. Klaster ekonomi dan pariwisata berkembang relatif lebih cepat dibandingkan klaster pendidikan dan kesehatan yang masih membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan.

Variabel disposisi menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki komitmen yang cukup tinggi terhadap pelaksanaan Program Kampung Bahari Nusantara. Pasmar II tetap memberikan pembinaan sesuai kapasitas kelembagaannya, Pemerintah Desa menunjukkan dukungan terhadap pengembangan kawasan, dan masyarakat mulai memanfaatkan peluang ekonomi yang muncul dari berkembangnya kawasan wisata Tlocor. Akan tetapi, tingkat partisipasi masyarakat masih bervariasi sehingga proses transformasi menuju masyarakat yang mandiri belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen implementor perlu diikuti dengan penguatan kesadaran dan kapasitas masyarakat agar pemberdayaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Selanjutnya, dari aspek struktur birokrasi, penelitian menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antaraktor telah berjalan cukup baik, namun koordinasi kelembagaan pascapembangunan masih memerlukan penguatan. Belum adanya mekanisme koordinasi formal yang berlangsung secara periodik menyebabkan pengelolaan lima klaster lebih banyak bergantung pada komunikasi informal dan inisiatif masing-masing aktor. Situasi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah mampu mendukung implementasi pada tahap pembangunan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan untuk menjamin kesinambungan implementasi kebijakan dalam jangka panjang. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi program telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pemanfaatan potensi lokal.

Meskipun demikian, proses pemberdayaan masih berada pada tahap penguatan kapasitas (capacity building). Sebagian masyarakat telah mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia, sedangkan sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan agar dapat berpartisipasi secara aktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan proses yang berlangsung secara bertahap dan memerlukan dukungan kelembagaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi Program Kampung Bahari Nusantara tidak dapat dipandang sebagai program yang selesai ketika pembangunan fisik berakhir, tetapi sebagai proses pembangunan sosial yang memerlukan pembinaan secara terus-menerus.

Berdasarkan hasil sintesis seluruh temuan penelitian, dapat dipahami bahwa implementasi Program Kampung Bahari Nusantara di Desa Kedungpandan telah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, namun tingkat keberhasilannya masih berbeda pada setiap klaster. Klaster ekonomi dan pariwisata menunjukkan perkembangan yang lebih cepat karena manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat, sedangkan klaster pendidikan, kesehatan, dan pertahanan memerlukan dukungan pembinaan yang lebih intensif agar manfaatnya dapat berlangsung dalam jangka panjang. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

implementasi kebijakan harus mempertimbangkan karakteristik masing-masing klaster dalam menentukan strategi pembinaan dan pengelolaan program.

Dengan demikian, implementasi Program Kampung Bahari Nusantara dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dapat dikategorikan efektif, namun belum optimal. Efektivitas implementasi terlihat dari keberhasilan pembangunan lima klaster, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, berkembangnya kawasan wisata Tlocor, serta terbentuknya kerja sama antaraktor. Namun, optimalisasi implementasi masih memerlukan penguatan pada aspek komunikasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan lokal, penyusunan mekanisme koordinasi formal, dan sistem pembinaan pascapembangunan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak berhenti pada pencapaian output, tetapi harus mampu menghasilkan outcome berupa masyarakat pesisir yang mandiri, berdaya, dan mampu mengelola potensi wilayahnya secara berkelanjutan .

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini mengemukakan bahwa keberlanjutan implementasi merupakan faktor yang membedakan keberhasilan pembangunan fisik dengan keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Program Kampung Bahari Nusantara telah berhasil membangun infrastruktur dan menciptakan peluang ekonomi, tetapi manfaat jangka panjang hanya akan tercapai apabila komunikasi antarpemangku kepentingan tetap terjaga, sumber daya operasional tersedia secara memadai, komitmen para pelaksana dipertahankan, dan struktur birokrasi mampu memfasilitasi koordinasi yang berkesinambungan. Dengan demikian, implementasi Program Kampung Bahari Nusantara perlu dipahami sebagai proses pemberdayaan yang terus berkembang, bukan sebagai program yang selesai setelah pembangunan fisik lima klaster dilaksanakan.

SIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kampung Bahari Nusantara dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, serta analisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Implementasi Program Kampung Bahari Nusantara di Desa Kedungpandan secara umum telah berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh terlaksananya pembangunan lima klaster, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan pertahanan. Keberhasilan implementasi tersebut didukung oleh komunikasi yang relatif efektif antara TNI Angkatan Laut, Pemerintah Desa, BUMDes, dan masyarakat; tersedianya sumber daya fisik yang memadai; adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana; serta struktur birokrasi yang telah membagi peran dan tanggung jawab masing-masing aktor.

Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Setelah pembangunan fisik selesai, masih diperlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, pembinaan masyarakat, serta sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik agar manfaat
Program Kampung Bahari Nusantara dapat terus berkembang dalam jangka panjang. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Program Kampung Bahari Nusantara didukung oleh beberapa faktor utama, yaitu: (1) komitmen kelembagaan dari TNI Angkatan Laut, Pemerintah Desa, dan BUMDes, (2) sinergi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan; (3) potensi sumber daya pesisir yang mendukung pengembangan ekonomi masyarakat; (4) partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kegiatan pemberdayaan; serta (5) tersedianya sarana dan prasarana hasil pembangunan lima klaster. Kelima faktor tersebut saling memperkuat dalam mendukung pelaksanaan program sehingga mampu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, serta membuka peluang pengembangan kawasan pesisir berbasis masyarakat.

Di samping berbagai faktor pendukung, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor yang menghambat keberhasilan implementasi, yaitu: (1) keterbatasan sumber daya operasional pascapembangunan; (2) belum optimalnya koordinasi lintas aktor setelah pembangunan selesai; (3) belum meratanya tingkat partisipasi masyarakat; (4) belum terbentuknya mekanisme kelembagaan yang permanen dalam pengelolaan lima klaster; dan (5) belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan implementasi Program Kampung Bahari Nusantara bukan lagi terletak pada pembangunan fisik, melainkan pada keberlanjutan pengelolaan program agar mampu menghasilkan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, D., Pratama, R. A., Sianturi, R. L., & Triyana, N. (2022). Strategi Pengembangan Blue Economy Wilayah Perbatasan Indonesia: Tata Kelola Ekonomi Maritim Pesisir Kepulauan Riau. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *4*(1), 166–177.

Aliyani, N. (2021). Strategi percepatan pembangunan desa berkembang: Upaya menuju desa mandiri yang berkelanjutan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 145–157.

Aminuddin, M. A., & Burhanuddin, A. (2023). Potensi Kekayaan Dan Keberagaman Maritim Di Wilayah Papua Dalam Upaya Mendorong Kesejahteraan Rakyat. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, *1*(4), 157–176.

Aulia, M. R., Azrani, U., Hasibuan, R. R. H., Tanjung, Y. W., Muzammil, A., & Nasution, A. (2026). *Agro Maritim Aceh Barat Selatan: Strategi Kemandirian Pangan dan Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Basri, H. (2020). Pengelolaan, pengawasan kawasan pesisir dan laut di Indonesia. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 1–27.

Daryono, A., Salim, S., & Nurisnaneny, P. S. (2021). Analisis Pembinaan Masyarakat Pesisir Berbasis Budaya Lokal Oleh Staf Potensi Maritim Lanal Bangka Belitung Dalam Mendukung Pertahanan Negara. *UIR Law Review*, *5*(2), 57–67.

Hafit, H. W. R., & Sukmana, H. W. R. H. (2023). Strategi BUMDes Dalam Pengembangan Pariwisata Di Wisata Bahari Tlocor. *Dialektika: Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, *8*(2), 317–331.

Kasmar, K., & Irawansah, D. (2025). Model Kebijakan Tata Kelola Sargassum yang Berkelanjutan dalam Penguatan Ekonomi Maritim Masyarakat Desa Pesisir Kabupaten Bima. *Jurnal Tana Mana*, *6*(2), 297–305.

Khoir, V. I. M. (2024). Menuju poros maritim dunia: Mewujudkan potensi maritim untuk ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. *Waqafilmunusantara. Com*.

Konradus, B. (2024). Maritime Culture As A Basis Of Community Resilience. *Jurnal Pluralis*, *3*(1), 304–323.

Kusendarto, K., & Maswir, M. (2025). Integrasi Kampung Bahari Nusantara dengan Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dalam Operasi Militer selain Perang. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *8*(11), 12814–12820.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Ningtyas, J. T. R., & Rosdiana, W. (2025). Pengembangan Wisata Bahari Tlocor Melalui Pentahelix Stakeholder. *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan*, *3*(2).

Nofiyanti, F., Adawiyah, R., Anjani, D. T., & Jidan, A. A. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Soft Skill Masyarakat Pesisir Pantai. *ADMA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *5*(2), 477âˆ – 488.

Padilah, A. H., Riyoldi, R., Nge, H. J., Apriyani, E., Rudiyanto, Y., & Nazari, N. A. (2025). A MODEL SINERGI PEMBANGUNAN DESA: INTEGRASI INFRASTRUKTUR, PEMBERDAYAAN, DAN PEMBINAAN UNTUK KEBERLANJUTAN. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, *27*(2), 172–190.

Perdani, A. S., Umar, G., Dewata, I., & Amar, S. (2025). Pembangunan berkelanjutan di pesisir Indonesia: Tantangan dan solusi atas ancaman lingkungan. *Journal of Current Research in Humanities, Social Sciences, and Business*, *2*(1), 11–22.

Prabowo, T. A., Afin, R., & Utomo, S. J. (2025). *Monograf Urban Tourism: Konsep Pengembangan Wisata Perkotaan adi Kabupaten Sidoarjo*. CV Eureka Media Aksara.

Rian, A., Fatah, Z., & Haryati, E. (2023). Pengembangan Pariwisata Berbasis Mayarakat di Wisata Bahari Tlocor Desa Kedungpandan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. *Soetomo Administrasi Publik*, 269–288.

Wulandari, M., Hasyim, A. W., & Rachmawati, T. A. (2025). PENGEMBANGAN WISATA BERKELANJUTAN TERHADAP PULAU LUSI DI KABUPATEN SIDOARJO. *Tata Kota Dan Daerah*, *17*(1), 55–64.